

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

VIRTA PUTRI ISNAENI
13810044

PEMBIMBING:

JAUHAR FARADIS, S.H.I, M.A.
NIP. 19840523 201101 1 008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Pada masa orde baru telah terjadi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meskipun pada saat itu telah diberlakukan peraturan undang-undang terkait otonomi daerah. Permasalahan ketimpangan tersebut dinilai sebagai pangkal dari timbulnya krisis saat itu. Akhirnya pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan dua undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah. Selama tahun 2010-2014, alokasi dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2009-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel analisis *fixed effect model*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009 hingga tahun 2014, untuk pertumbuhan ekonomi keseluruhan variabel berupa Desentralisasi Fiskal (DF), kemiskinan (POV) memiliki pengaruh yang signifikan dan sesuai hipotesis penelitian, kecuali variabel pengangguran (UE). Adapun pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) keseluruhan variabel berupa Desentralisasi Fiskal (DF), ketimpangan (GI), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata tiap variabel telah berpengaruh signifikan dan sesuai dengan hipotesis penelitian, kecuali variabel Dana Bagi Hasil (DBH).

Kata Kunci: *Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi*

Abstrac

In the new order, the financial imbalances have occurred between the central government and regional governments although at the time it was enacted regulatory laws relating to regional autonomy. The problem of inequality is considered as the base of the onset of the current crisis. Finally in 1999 the government passed two laws on regional autonomy, Undang-Undang No. 22 Years 1999 and Undang-Undang No. 25 Years 1999 were revised by Undang-Undang No. 32 and 33 Years 2004 concerning Local Government and Regional Financial Balance. During 2010-2014, the allocation of Fund Balance increased by an average of 10,8% per year, whereas in 2015 are expected to increase 9,4% from 2014.

This study aimed to analyze the effect of fiscal decentralization on public investment, economic growth and regional development performance in Indonesia in 2009-2014. The data used in this research is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance. The method used in this study using fixed effect models panel data regression analysis .

The results showed that in the period 2009 to 2014, the variable fiscal decentralization on economic growth performance together significant and positive impact except Unemployment (UE) variable, then for Human Development Index (HDI) variable, performance significant except one variable.

Keywords: *Economic Growth ,Fiscal Decentralization, Human Development Index*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Virta Putri Isnaeni

NIM : 13810044

Judul Skripsi : **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Investasi Publik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kinerja Pembangunan Daerah di Indonesia”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Robi'ul Awwal 1438 H
23 Desember 2016 M

Pembimbing


Jauhar Faradis, S.H.I, M.A
NIP. 19840523 201101 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-529/Un.02/DEB/PP.05.3/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks
Pembangunan Manusia di Indonesia”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Virta Putri Isaeni

NIM : 13810044

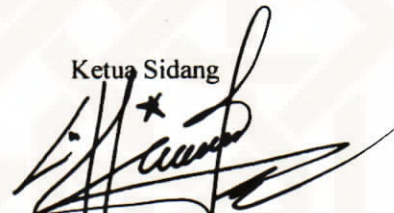
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 11 Januari 2017

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

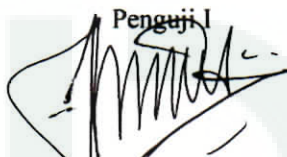
TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Jauhar Faradis, S.H.I. M.A
NIP. 19840523 201101 1 008

Penguji I



Muhammad Ghafur Wibowo, S.E. M.Sc
NIP: 19800314 200312 1 003

Penguji II



Ibi Satibi, S.H.I. M.Si
NIP: 19770910 200901 1 001

Yogyakarta, 17 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Virta Putri Isnaeni
NIM : 13810044
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekoomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penyusun



Virta Putri Isnaeni
NIM. 13810044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virta Putri Isnaeni
NIM : 13810044
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 17 Februari 2016

Yang menyatakan



(Virta Putri Isnaeni)

HALAMAN MOTTO

*Jika Kita Melakukan yang Terbaik yang Dapat Kita
Lakukan, Kita Tidak Akan Tahu Keajaiban Apa yang
Akan Terjadi Dalam Hidup Kita*

Helen Keller

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk
Ayahanda Suyitno, Ibunda Indah, dan Kakakku Ady tercinta
serta almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amin.

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan liku-liku yang membuat penulis harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian. Untuk itu, penulis dengan ikhlas ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pembimbing materi maupun teknis. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Suyitno dan Ibunda Indah serta kakakku Adi Purwo Handoyo yang selalu memotivasi penulis.
2. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.,. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
4. Sunaryati, SE, M.Si., selaku Kaprodi Ekonomi Syari'ah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Jauhar Faradis, S.H.I, M.A selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
6. Teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah 2013 khususnya EKSYA (A) yang telah banyak membantu penulis.
7. Teman-teman KKN kelompok ke-86 Angkatan 89, Mas Nanda, Mas Syarif, Hendra, Eni, Fury, Sri, dan Nita yang telah banyak memberi pelajaran hidup bagi penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal*
„Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Penyusun,

Virta Putri Isnaeni
NIM: 13810044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fatḥah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	Ā
جاهليَّة	ditulis	jāhiliyyah
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	tansā
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	karīm
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
فُرُوض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Otonomi Daerah	10
2.2 Desentralisasi Fiskal	
2.2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)	12
2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	12
2.2.3 Dana Bagi Hasil	12
2.3 Pendapatan Asli Daerah	16
2.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	21
2.6. Pengangguran dan Kemiskinan.....	23
2.7. Ketimpangan	24
2.8. Keuangan Publik dan Kebijakan Fiskal dalam Islam	28
2.9. Telaah Pustaka.....	30
2.10. Kerangka Penelitian	38
2.11. Hipotesis	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Definisi Operasional Variabel	44
3.4 Data dan Sumber Data.....	49
3.5 Metode Analisis Data	51
3.6 Teknik Analisis Data	55
3.6.1 Uji Spesifikasi Model	55
3.6.2 Pengujian Hipotesis	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	60
4.1.1 Keadaan Geografis.....	60
4.1.2 Keadaan Ekonomi.....	61
4.1.3 Investasi	63
4.1.4 Kinerja Pembangunan Daerah	64
4.2 Analisis Deskriptif.....	68
4.3 Hasil Analisis Regresi	70
4.3.1 Uji Spesifikasi Model.....	72
4.3.2 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	73
4.4 Pengujian Hipotesis.....	77
4.5 Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Keterbatasan	88
5.3 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Analisis Deskriptif	67
Tabel 4.2 Tabel Uji <i>Likelihood</i> Investasi Publik.....	68
Tabel 4.3 Tabel Uji <i>Hausman Test</i> Investasi Publik.....	69
Tabel 4.4 Tabel Uji <i>Likelihood</i> Pertumbuhan Ekonomi	70
Tabel 4.5 Tabel Uji <i>Hausman Test</i> Pertumbuhan Ekonomi	70
Tabel 4.6 Tabel Uji <i>Likelihood</i> Kinerja Pembangunan.....	71
Tabel 4.7 Tabel Uji <i>Hausman Test</i> Kinerja Pembangunan.....	72
Tabel 4.8 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> Investasi Publik	73
Tabel 4.9 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> Pertumbuhan Ekonomi	73
Tabel 4.10 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> Kinerja Pembangunan	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah	2
Gambar 1.2 Grafik PDB atas Dasar Harga Konstan	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	38
Gambar 4.1 Grafik Nilai Indeks Pembangunan Manusia	65
Gambar 4.2 Grafik Presentase Penduduk Miskin di Indonesia	63
Gambar 4.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

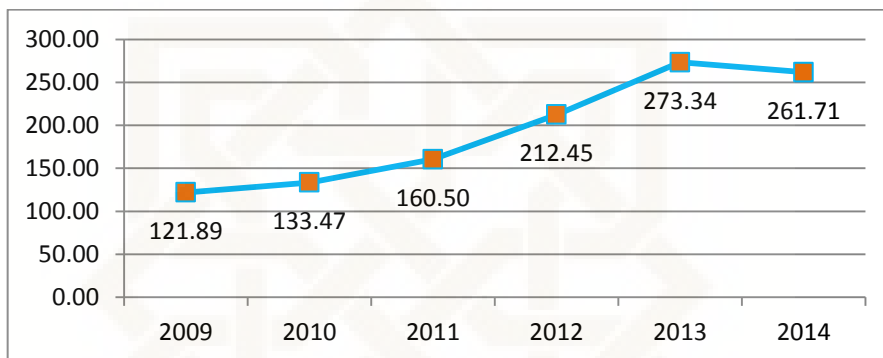
1.1. Latar Belakang

Sejauh ini pembicaraan kita mengenai keuangan negara dan kebijakan fiskal selalu dihubungkan dengan satu tingkat pemerintahan namun belum jelas tingkat pemerintahan yang mana. Sesungguhnya tingkat pemerintahan itu dibedakan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pembagian daerah administrasi tersebut, maka mau tidak mau dituntut adanya sistem keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan, terutama penyediaan jasa-jasa publik (Suparmoko, 2000: 307-308).

Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah yang perlu diketahui adalah karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah tersebut. Di Indonesia, selama masa orde baru telah terjadi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meskipun pada saat itu telah diberlakukan peraturan undang-undang terkait otonomi daerah. Permasalahan ketimpangan tersebut dinilai sebagai pangkal dari timbulnya krisis saat itu. Akhirnya pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan dua undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah (Situngkir, 2014: 126).

Sejak awal dibentuknya Undang-Undang terkait pelaksanaan otonomi daerah, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi terjadinya

ketimpangan di daerah. Oleh sebab itu, dana transfer ke daerah selalu meingkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan Nokta Keuangan Kementrian Keuangan memaparkan bahwa selama tahun 2010-2014, alokasi dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014. Selain itu, realisasi penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat cenderung meningkat.



Gambar 1.1

Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah atas Pemerintah Pusat

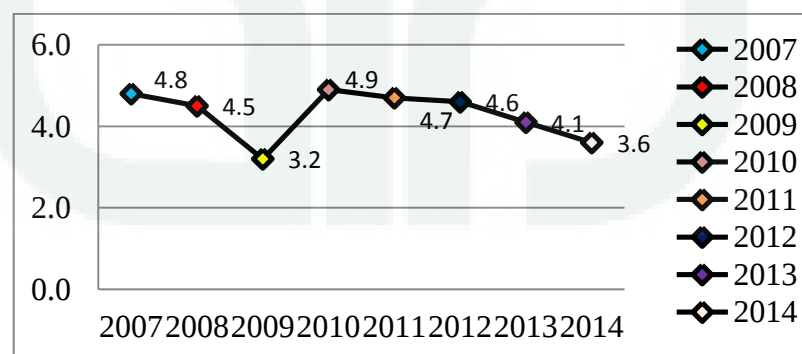
Sumber: Kementerian Keuangan, 2015 (diolah kembali)

Gambar 1.1 bahwa dalam kurun waktu 2009-2014, penerimaan daerah atas pusat terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Dalam pengalokasian anggaran per daerah, ada komponen dana perimbangan mempunyai konsep trilogi perimbangan. Konsep anggaran ini mempunyai arti bahwa tiga komponennya mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk daerah-daerah yang masih kekurangan dana untuk membiayai kebutuhan

daerahnya setelah memperhitungkan DBH dan DAU yang diterimanya (Nokta Keuangan RAPBN, 2015: 385).

Adapun indikator lain untuk mengukur level desentralisasi adalah rasio total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pemerintah masing-masing daerah. Selain itu dapat digunakan juga dengan mengukur total PAD terhadap pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah atau mengukur total rasio PAD terhadap pendapatan dan perimbangan (Akai dan Sakata, 2002, dalam Hariyanto, 2012: 39).

Jika dilihat dari sisi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang cenderung menurun, namun ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebabnya. Sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia telah mengalami banyak gejolak. Pada tahun 2013, pertumbuhan PDB turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global dan selama tahun 2014 pertumbuhan masih melambat. Meskipun dengan adanya perlambatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui negara-negara lain di ASEAN (Survey OECD, 2015: 5).



Gambar 1.2
Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2014 (%)

Sumber: BPS Pusat, 2014 (telah diolah kembali)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia digambarkan dengan pertumbuhan PDB Nasional atas dasar harga konstan. Seperti yang dijelaskan dalam publikasi Bank Dunia sebelumnya, bahwa salah satu penyebabnya adalah inflasi, dimana pada tahun 2008 terjadi krisis global saat itu. Meski pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi meningkat, namun pada tahun 2011-2014 terus mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa, antara transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional belum berjalan sejalan. Meski tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah sehingga mendorong perekonomian nasional, namun faktanya belum dapat terlaksana sepenuhnya.

Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal secara makro. Sendie (2013) yang meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Timur memberikan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berbeda hasilnya dengan Mulyono (2012) yang meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa daerah dengan transfer dari pemerintah pusat yang tinggi akan memperburuk indikator kesejahteraan dan perekonomiannya.

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas mengenai pengaruh desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut dengan memilih judul penelitian **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”**. Penelitian mengambil tahun

objek penelitian dari tahun 2009-2014. Alasan diambilnya objek tersebut adalah karena berdasarkan laporan Bank Dunia, pada tahun 2009 dimana setelah terjadinya krisis secara global meskipun laju pertumbuhan Indonesia terus mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling baik, yaitu rata-rata 6%.

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum, desentralisasi fiskal menghendaki adanya devolusi antar jenjang pemerintah dari peran keuangan. Sebagian ahli menyatakan bahwa sasaran utama desentralisasi fiskal adalah dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta merupakan solusi dalam mengatasi ketidakstabilan makroekonomi, dan ketidakefisienan pemerintahan. Dana transfer ke daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dana transfer ke daerah tersebut mempengaruhi kapasitas belanja daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah. Selama tahun 2010-2014, alokasi dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014 .

Namun, kondisi tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang justru menurun setiap tahunnya diakibatkan oleh tingginya inflasi. Sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia telah mengalami banyak gejolak. Pada tahun 2013, pertumbuhan PDB turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global dan selama tahun 2014 pertumbuhan masih melambat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh variabel ketimpangan terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh variabel Dana Bagi Hasil terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis Perbandingan Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh variabel ketimpangan terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh variabel Dana Bagi Hasil terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang studi kebijakan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja kebijakan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal sehingga dapat membuat kebijakan yang mampu mendorong kebijakan desentralisasi fiskal agar dapat optimal pemanfaatannya.
- c. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam wacana otonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sehingga diharapkan dapat ikut mengisi ruang yang masih cukup lebar bagi penelitian kebijakan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal dalam kasus antar Provinsi.

1.4. Sistematika Penelitian

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan titik tolak dan menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang yang menguraikan isu dan beberapa fenomena pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya melalui penelitian ini dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penelitian.

Bab II Landasan Teori memuat tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, pada permulaan akan digambarkan secara singkat keadaan geografis, demografis, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, perekonomian, dan kesejahteraan. Kemudian, bab ini dilanjutkan dengan hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data. Hasil penelitian adalah jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di BAB I.

Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini juga disampaikan saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Saran atau implikasi kebijakan yang dapat diturunkan berdasarkan temuan utama penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Transfer ke daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY, serta dana transfer Lainnya. Dana transfer ke daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dana transfer ke daerah tersebut mempengaruhi kapasitas belanja daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah. Selama tahun 2010-2014, alokasi Dana Perimbangan meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014. Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah di Indonesia, sehingga timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal akan memberi manfaat seperti perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan kemiskinan, manajemen ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut juga karena dengan adanya desentralisasi

fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan anggarannya guna mendorong pembangunan ekonomi yang juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tiap daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan turut meningkat.

2. Variabel kemiskinan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan desentralisasi fiskal dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor-sektor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, persaingan antar daerah juga memacu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dengan biaya yang minimum, dan mendorong terjadi efisiensi produksi. Ini merupakan argumen yang mendukung pandangan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Hipotesis Peningkatan Produktivitas (*productivity enhancement hypothesis*).
3. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Todaro (2006: 119) berpendapat bahwa hal tersebut bergantung pada kemampuan sistem perekonomian dalam menyerap dan memperkerjakan secara produktif tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan tingkat jenis akumulasi modal serta ketersediaan lapangan kerja maupun keterampilan manajerial dan administratif. Meskipun juga pertumbuhan penduduk yang kemudian diikuti dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang

pertumbuhan ekonomi, karena juga berarti akan banyak pekerja yang produktif sehingga meningkatkan potensial pasar domestik.

4. Variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Meski selama kurun waktu 2014 IPM di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya ada banyak faktor selain desentralisasi fiskal yang dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya IPM tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti faktor pembangunan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat ditingkatkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Karenanya, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM.
5. Variabel ketimpangan (GI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ketimpangan yang merupakan salah satu faktor kontrol pembangunan menjadi hal yang diperhatikan dalam pembangunan. Jika ketimpangan suatu daerah menurun, maka hal tersebut menandakan bahwa pembangunan dalam suatu daerah dapat dikatakan baik.
6. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena Dana Bagi Hasil merupakan komponen dana perimbangan yang berarti bahwa kewenangan daerah tidak optimal karena adanya campur tangan pemerintah pusat. Sehingga dana yang digunakan pun akan dibatasi sesuai dengan presentasi yang ditentukan pemerintah.

7. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Melalui kebijakan ini, daerah mampu memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah pun akan turut meningkat.

5.2. Keterbatasan

1. Data yang ada seringkali tidak konsisten dalam penyajiannya seringkali menunjukkan angka yang berbeda padahal dalam kurun waktu yang sama, disebabkan adanya metode baru dalam perhitungan statistik sehingga menyulitkan peneliti untuk mengambil data mana yang digunakan.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam memaksimalkan fungsi desentralisasi fiskal, di antaranya adalah sbb:

1. Tiap daerah hendaknya mengoptimalkan APBD untuk membantu membangun UMKM di masyarakat guna mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
2. Setiap daerah di Indonesia masing-masing memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, sehingga sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan daerah dari potensi daerah terlebih dahulu, terutama pada daerah yang masih tertinggal namun dengan sumber daya alam yang menjanjikan. Upaya tersebut salah satunya dapat

dilaksanakan dengan cara peningkatan sumber daya manusia. Sehingga nantinya pembangunan dapat lebih merata.

3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mengurangi korupsi yang terjadi di daerah sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Karena kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, sehingga tanpa pengawasan yang ketat akan memberikan peluang besar untuk korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 183 Kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi, 110 di antaranya adalah Bupati sepanjang tahun 2010-2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zulyanto, 2010, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Ekonomi.
- Agus Widarjono, 2009, *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Al-Qur'an dan Terjemah, 2013, *Al-Qur'an Keluarga Edisi Mawaddah*, Jawa Timur: Halim Publishing and Distributing
- Andros M.P. Hasugian, 2006, *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat*, Skripsi Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
- Any Setianingrim, 2013, *Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam*, Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol. 4, No. 1.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Indeks Kemiskinan Indonesia 2010*, BPS Pusat
- Badan Pusat Statistik, 2015a, *Laju Pertumbuhan PDB per Kapita Beberapa Negara Menurut Harga Konstan (persen) 2000-2014*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015b, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (miliar rupiah) 2007-2015*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015c, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2008-2011*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015d, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2011-2014*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015e, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2012-2015*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015f, *PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015g, *PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*, BPS Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2015h, *Kemajuan Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Jakarta: BPS Pusat
- Bank Dunia, 2015, *Survey Ekonomi OECD Indonesia Maret 2015*, Indonesia: OECD Economic Surveys.
- BAPPEDA, 2012, *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk 2011*, Semarang: BAPPEDA Semarang

- BAPPENAS, 2013, *Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014)*, Jakarta: Bappenas.
- BAPPENAS, 2014, *Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014*, Jakarta: Bappenas
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 dan Kinerja Tahun 2014*, Setjen DPR-RI
- Bruce Herrick dan Charles P. Kindleberger, 1988, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*, (Komaruddin, Hasymi Ali, dan G. Kartasapoetra, Penerjemah), Jakarta: Bina Aksara
- Dedy Tri Hariyanto, 2012, *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi*, Tesis Universitas Indonesia Jakarta, Fakultas Ekonomi.
- Dudi Hermawan, 2007, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)*, Tesis Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pasca Sarjana Progam Studi Ilmu Perencanaan Wilayah.
- Freddy Situngkir, dkk, 2014, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ekonom, Vol. 17, No. 3.
- Gede Williantara dan I Gusti Ayu, 2016, *Pengaruh Pendapatam Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3, ISSN: 2302-8556.
- Henry Faizal Noor, 2015, *Ekonomi Publik Edisi Kedua*, Jakarta: Permata Putri Media.
- Ibnu Katsir, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Abdul Gaffar, Abdurrahim Mu'ti, dan Abu Ihsan Al-Itsari, Penerjeman), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Katsir, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Abdul Gaffar, Abdurrahim Mu'ti, dan Abu Ihsan Al-Itsari, Penerjeman), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i/
- Kementrian Keuangan, 2015, *Nokta Keuangan RAPBN 2016*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Krisztina Kis-Katos dan Bambang Suharnoko Sjahrir, 2014, *The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investments in Indonesia*, Discussion Paper No.7884, IZA, Germany.
- Mankiw, N. Gregory, 2003, *Pengantar Ekonomi, "Principles Of Economics"*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi

- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mochammad Ardi Wibowo, 2006, *Analisa Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ekonomi.
- Mudrajad Kuncoro, 2013, *Metode Ridet untuk Ekonomi & Bisnis Edisi 4*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyono, 2012, *The Impact of Fiscal Decentralization on Regional Economic Development in Indonesia For the Periods 2005-2008*, Paper presented to the Higher Degree Committee of Ritsumeikan Asia Pasific University.
- Nur Rianto, 2010, *Teori Makroekonomi Islam "Konsep, Teori, dan Analisis"*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Nona Novarianti, 2016, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemediasi pada Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2013*. Thesis Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Nurlan Darise, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP, dan 15 Permendagri)*, Jakarta: Permata Putri Media
- Nurul Huda, dkk, 2009, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana
- Nurul Huda dan Ahmad Muti, 2011, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Putu Gede dan I Gusti Ketut, 2015, *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3, ISSN: 2302-8556.
- Raharjo Adisasmita, 2013, *teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reksohadiprodjo, 2013, *Ekonomi Publik Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE IKAPI.
- Rohmat dan Supriyanto, 2015, *Pengantar Statsistika*, Yogyakarta: KalimediaSlamet
- Rahadi dan Muhammad Safri, 2014, *Peningkatan Belanja Modal dan Hubungannya terhadap Peningkatan Belanja Aset dan PAD Provinsi Jambi*, Jurnal Paradigma Ekonomi, Vol.9, No.1.
- Sadorno Sukirno, 2007, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sarwoko, 2005, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sendie Enril Fahrian, 2013, *Analisis Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Fakultas Ekonomi.

Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Yogyakarta: BPFE IKAPI.

Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Jakarta: Prenada Media Group.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/ekonomi_pembangunan/bab_3_teor_i_pertumbuhan_dan_pembangunan_ekonomi.pdf (7 April 2016).

<http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/12/08/indonesia-to-grow-by-5-2-percent-in-2015-world-bank-report> (15 Maret 2016).

www.antikorupsi.org/id diakses pada (21 November 2016).

http://indonesia.go.id/?page_id=479&lang=id (27 November 2016).



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

No	Halaman	Nama Surat dan Ayat	Terjemahan
1.	26	QS. An-Nahl: 90	<i>Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan (Dia) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.</i>
2	38	QS. Al-Ĥadīd: 7	<i>Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.</i>

LAMPIRAN II

STATISTIK DESKRIPTIF (SPSS 15)

1. Pertumbuhan Ekonomi

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	198	1756,7159	4,6912	1761,4071	232,2488	336,0651865
POV	198	34,0	3,5	37,5	13,211	7,2839
UE	198	13,14	1,83	14,97	6,0847	2,51376
Valid N (listwise)	198					

2. Indeks Pembangunan Manusia

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	198	23,94	54,45	78,39	67,5646	4,49063
DF	198	,381	-,181	,201	,02330	,037359
PAD	198	31209,771	64,445	31274,216	2426,269	4273,144140
DBH	198	11263,91	15,722268	11279,64	879,2032	1766,951978
GI	198	,19	,27	,46	,3671	,04027
Valid N (listwise)	198					

LAMPIRAN III

1.

Data APBD DAU dan DAK 2009-2014 (Dalam Milyar Rupiah)

Provinsi	Periode	APBD	DAU	DAK	DAU+DAK
Nangroe_Aceh_Darussalam	2009	6042.47	509.69	48.19	557.88
Sumatera_Utara	2009	3212.56	761.05	46.30	807.35
Sumatera_Barat	2009	2026.24	648.94	47.18	696.12
Riau	2009	3231.91	171.85	0.00	171.85
Kepulauan_Riau	2009	1459.00	403.13	20.93	424.06
Jambi	2009	1353.90	473.51	35.12	508.63
Sumatera_Selatan	2009	2397.69	507.36	0.00	507.36
Bangka_Belitung	2009	804.85	407.99	45.56	453.56
Bengkulu	2009	914.36	487.34	53.28	540.62
Lampung	2009	1742.39	628.51	40.02	668.52
DKI_Jakarta	2009	19251.89	0.00	0.00	0.00
Banten	2009	2436.10	361.30	32.12	393.42
Jawa_Barat	2009	7785.89	984.30	0.00	984.30
Jawa_Tengah	2009	5696.66	1130.74	3.44	1134.18
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2009	1286.07	523.92	33.41	557.33
Jawa_Timur	2009	7827.69	1184.48	18.00	1202.48
Bali	2009	1902.23	471.79	36.11	507.90
Nusa_Tenggara_Timur	2009	1023.51	652.76	59.73	712.49
Nusa_Tenggara_Barat	2009	1173.51	554.43	48.02	602.46
Kalimantan_Barat	2009	1577.89	744.83	53.31	798.15
Kalimantan_Tengah	2009	1367.41	694.82	59.30	754.12
Kalimantan_Selatan	2009	2109.41	484.06	43.35	527.41
Kalimantan_Timur	2009	5348.93	18.16	3.81	21.97
Sulawesi_Utara	2009	1023.35	558.63	52.88	611.51
Gorontalo	2009	561.19	388.33	51.35	439.67
Sulawesi_Tengah	2009	1052.33	629.40	60.06	689.45
Sulawesi_Barat	2009	554.24	391.05	66.05	457.10
Sulawesi_Selatan	2009	2175.75	663.42	44.85	708.27
Sulawesi_Tenggara	2009	1030.72	589.84	56.32	646.16
Maluku	2009	1008.73	578.16	68.27	646.43
Maluku_Utara	2009	685.77	458.51	83.66	542.17
Papua	2009	6012.82	1058.23	81.27	1139.50
Papua_Barat	2009	2822.59	595.76	68.58	664.34
Nangroe_Aceh_Darussalam	2010	6967.82	621.07	43.42	664.49
Sumatera_Utara	2010	3885.64	812.75	29.14	841.89
Sumatera_Barat	2010	1920.97	662.40	14.42	676.82
Riau	2010	4346.85	58.87	22.37	81.24

Kepulauan_Riau	2010	1853.59	310.16	4.56	314.72
Jambi	2010	1640.19	488.74	20.03	508.77
Sumatera_Selatan	2010	3224.16	512.08	17.81	529.89
Bangka_Belitung	2010	848.03	410.64	8.07	418.71
Bengkulu	2010	1000.86	523.04	20.98	544.03
Lampung	2010	2091.68	643.38	27.57	670.95
DKI_Jakarta	2010	23025.99	0.00	0.00	0.00
Banten	2010	3139.44	381.98	13.66	395.64
Jawa_Barat	2010	9742.19	1086.12	38.57	1124.69
Jawa_Tengah	2010	6626.32	1168.79	28.30	1197.09
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2010	1374.21	527.47	11.38	538.86
Jawa_Timur	2010	9980.54	1212.93	56.98	1269.92
Bali	2010	2237.71	489.94	8.35	498.29
Nusa_Tenggara_Timur	2010	1088.07	674.64	30.25	704.89
Nusa_Tenggara_Barat	2010	1272.22	573.07	24.76	597.83
Kalimantan_Barat	2010	1778.93	755.12	29.62	784.74
Kalimantan_Tengah	2010	1555.43	707.88	32.30	740.18
Kalimantan_Selatan	2010	2279.78	458.07	19.84	477.91
Kalimantan_Timur	2010	7044.56	0.16	33.64	33.81
Sulawesi_Utara	2010	1158.67	558.78	17.44	576.22
Gorontalo	2010	593.42	400.75	10.73	411.49
Sulawesi_Tengah	2010	1177.61	659.33	28.60	687.93
Sulawesi_Barat	2010	610.38	405.75	17.53	423.28
Sulawesi_Selatan	2010	2564.08	706.28	29.28	735.55
Sulawesi_Tenggara	2010	1055.17	595.76	24.03	619.79
Maluku	2010	952.66	607.57	32.77	640.34
Maluku_Utara	2010	695.83	479.48	26.39	505.87
Papua	2010	5661.74	1148.50	75.06	1223.55
Papua_Barat	2010	3407.80	605.79	21.76	627.54
Nangroe_Aceh_Darussalam	2011	7610.32	716.65	50.61	767.26
Sumatera_Utara	2011	4958.48	948.87	38.49	987.35
Sumatera_Barat	2011	2071.16	764.68	40.73	805.41
Riau	2011	5440.44	380.05	56.82	436.87
Kepulauan_Riau	2011	1876.88	395.75	21.90	417.65
Jambi	2011	2078.81	583.88	24.74	608.62
Sumatera_Selatan	2011	3963.98	646.81	32.29	679.10
Bangka_Belitung	2011	1193.50	481.59	17.88	499.47
Bengkulu	2011	1166.98	607.39	36.61	644.00
Lampung	2011	2527.99	769.97	42.21	812.18
DKI_Jakarta	2011	28297.36	209.91	0.00	209.91
Banten	2011	3755.61	460.38	45.18	505.56
Jawa_Barat	2011	11053.86	1181.55	45.76	1227.32
Jawa_Tengah	2011	7547.67	1276.18	51.79	1327.97

Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2011	1604.91	620.81	19.49	640.30
Jawa_Timur	2011	11493.38	1347.50	55.03	1402.53
Bali	2011	2662.08	560.67	15.92	576.59
Nusa_Tenggara_Timur	2011	1324.47	752.06	47.40	799.46
Nusa_Tenggara_Barat	2011	1689.35	646.67	45.96	692.64
Kalimantan_Barat	2011	2202.22	845.48	38.37	883.85
Kalimantan_Tengah	2011	1921.94	795.82	51.92	847.73
Kalimantan_Selatan	2011	3148.04	504.88	37.25	542.12
Kalimantan_Timur	2011	9817.10	51.45	38.19	89.63
Sulawesi_Utara	2011	1365.71	619.71	29.29	649.00
Gorontalo	2011	697.58	461.12	28.06	489.18
Sulawesi_Tengah	2011	1410.59	743.16	38.18	781.34
Sulawesi_Barat	2011	718.87	441.58	35.86	477.44
Sulawesi_Selatan	2011	3110.57	816.76	41.89	858.64
Sulawesi_Tenggara	2011	1288.98	700.84	33.80	734.64
Maluku	2011	1138.19	703.99	44.66	748.65
Maluku_Utara	2011	936.79	540.39	51.23	591.62
Papua	2011	6227.55	1276.29	72.12	1348.40
Papua_Barat	2011	3699.88	700.44	40.54	740.98
Nangroe_Aceh_Darussalam	2012	9180.14	911.08	50.41	961.49
Sumatera_Utara	2012	7201.84	1103.39	41.63	1145.02
Sumatera_Barat	2012	2922.58	918.56	32.50	951.06
Riau	2012	6847.32	489.18	62.49	551.67
Kepulauan_Riau	2012	2473.41	460.86	23.17	484.02
Jambi	2012	2654.69	731.95	33.11	765.06
Sumatera_Selatan	2012	5223.88	716.15	45.40	761.55
Bangka_Belitung	2012	1384.94	634.09	25.14	659.22
Bengkulu	2012	1562.53	775.31	28.62	803.93
Lampung	2012	3724.00	939.14	31.09	970.23
DKI_Jakarta	2012	35379.18	275.33	0.00	275.33
Banten	2012	5413.71	530.83	29.69	560.52
Jawa_Barat	2012	16878.13	1269.96	48.36	1318.32
Jawa_Tengah	2012	11694.48	1516.89	50.63	1567.52
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2012	2171.73	757.06	19.05	776.11
Jawa_Timur	2012	15543.04	1491.56	53.49	1545.05
Bali	2012	3633.13	694.08	34.03	728.10
Nusa_Tenggara_Timur	2012	2241.54	940.65	57.09	997.74
Nusa_Tenggara_Barat	2012	2242.82	809.62	53.33	862.94
Kalimantan_Barat	2012	2932.91	1023.23	43.91	1067.14
Kalimantan_Tengah	2012	2514.03	951.26	50.18	1001.44
Kalimantan_Selatan	2012	4381.61	652.54	38.85	691.38
Kalimantan_Timur	2012	11886.47	52.64	34.62	87.25
Sulawesi_Utara	2012	1834.91	790.53	43.54	834.07

Gorontalo	2012	933.17	582.14	24.01	606.15
Sulawesi_Tengah	2012	1962.39	902.09	43.24	945.32
Sulawesi_Barat	2012	959.03	590.68	36.79	627.47
Sulawesi_Selatan	2012	4433.96	996.94	42.77	1039.71
Sulawesi_Tenggara	2012	1811.98	870.2579	34.66	904.92
Maluku	2012	1436.65	829.49	38.06	867.55
Maluku_Utara	2012	1196.75	703.16	37.86	741.02
Papua	2012	7462.04	1569.78	106.19	1675.97
Papua_Barat	2012	3873.39	901.40	38.63	940.03
Nangroe_Aceh_Darussalam	2013	10671.83	1092.45	75.15	1167.59
Sumatera_Utara	2013	7397.99	1223.45	54.82	1278.27
Sumatera_Barat	2013	3147.84	1039.92	63.94	1103.86
Riau	2013	6994.65	726.63	38.74	765.37
Kepulauan_Riau	2013	2843.72	656.07	36.67	692.74
Jambi	2013	2886.31	836.58	53.33	889.91
Sumatera_Selatan	2013	5468.14	870.52	25.19	895.71
Bangka_Belitung	2013	1529.11	717.14	44.17	761.31
Bengkulu	2013	1696.37	854.65	51.59	906.24
Lampung	2013	3901.95	1060.66	60.11	1120.77
DKI_Jakarta	2013	39517.54	299.18	0.00	299.18
Banten	2013	6230.23	617.08	10.60	627.68
Jawa_Barat	2013	19237.61	1472.45	80.07	1552.53
Jawa_Tengah	2013	13343.36	1670.86	82.52	1753.38
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2013	2583.06	828.33	34.50	862.83
Jawa_Timur	2013	17372.77	1496.59	48.05	1544.64
Bali	2013	4109.38	792.37	43.84	836.20
Nusa_Tenggara_Timur	2013	2393.07	1003.99	77.82	1081.81
Nusa_Tenggara_Barat	2013	2379.59	859.353	57.41	916.76
Kalimantan_Barat	2013	3262.31	1144.71	74.17	1218.89
Kalimantan_Tengah	2013	2809.10	1062.52	63.30	1125.82
Kalimantan_Selatan	2013	4350.81	683.51	41.55	725.06
Kalimantan_Timur	2013	11631.70	55.54	8.05	63.59
Sulawesi_Utara	2013	2062.08	885.68	54.35	940.03
Gorontalo	2013	1052.63	652.28	43.01	695.30
Sulawesi_Tengah	2013	2132.94	994.66	65.95	1060.61
Sulawesi_Barat	2013	1073.86	685.50	47.02	732.51
Sulawesi_Selatan	2013	4867.59	1089.77	64.26	1154.04
Sulawesi_Tenggara	2013	1972.56	981.04	53.27	1034.30
Maluku	2013	1545.46	897.66	53.42	951.08
Maluku_Utara	2013	1315.90	772.59	69.69	842.28
Papua	2013	8361.14	1889.27	133.90	2023.17
Papua_Barat	2013	5637.70	1064.87	64.93	1129.80
Nangroe_Aceh_Darussalam	2014	11606.32	1201.61	72.95	1274.57

Sumatera_Utara	2014	7772.03	1349.13	59.73	1408.86
Sumatera_Barat	2014	3635.84	1129.89	54.11	1183.99
Riau	2014	8132.41	820.98	43.74	864.72
Kepulauan_Riau	2014	2919.19	698.01	41.68	739.69
Jambi	2014	3165.06	948.34	49.36	997.69
Sumatera_Selatan	2014	6237.37	985.54	62.75	1048.30
Bangka_Belitung	2014	1719.59	806.82	43.37	850.19
Bengkulu	2014	1986.24	955.10	53.93	1009.02
Lampung	2014	4526.53	1136.05	48.85	1184.90
DKI_Jakarta	2014	43824.30	85985.28	0.00	85985.28
Banten	2014	7068.43	728.49	12.54	741.03
Jawa_Barat	2014	22310.95	1687.69	78.22	1765.90
Jawa_Tengah	2014	15157.46	1803.93	79.17	1883.10
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2014	3139.87	899.92	37.13	937.06
Jawa_Timur	2014	20772.48	1866.55	101.88	1968.42
Bali	2014	4577.68	832.30	41.60	873.90
Nusa_Tenggara_Timur	2014	2787.59	1131.69	74.24	1205.92
Nusa_Tenggara_Barat	2014	2789.43	980.39	54.66	1035.05
Kalimantan_Barat	2014	3719.77	1290.22	63.19	1353.41
Kalimantan_Tengah	2014	3129.69	1152.43	61.93	1214.36
Kalimantan_Selatan	2014	4793.16	701.73	54.19	755.92
Kalimantan_Timur	2014	11285.83	57.31	1.04	58.35
Sulawesi_Utara	2014	2320.81	949.85	59.68	1009.53
Gorontalo	2014	1209.05	734.28	42.37	776.65
Sulawesi_Tengah	2014	2440.23	1087.89	63.94	1151.83
Sulawesi_Barat	2014	1240.24	776.21	50.59	826.80
Sulawesi_Selatan	2014	5503.16	1209.60	72.98	1282.58
Sulawesi_Tenggara	2014	2189.56	1053.64	58.75	1112.39
Maluku	2014	1823.03	1019.70	70.13	1089.84
Maluku_Utara	2014	1508.58	906.62	74.62	981.25
Papua	2014	10709.82	1991.20	120.51	2111.71
Papua_Barat	2014	5762.35	1122.26	61.22	1183.48

2.

Data Penelitian Regresi Data Panel Pertumbuhan Ekonomi*

Provinsi	Periode	PDRB ¹	POV ²	UE ³	df ⁴
Nangroe_Aceh_Darussalam	2009	71.70	21.80	8.71	0.055
Sumatera_Utara	2009	236.35	11.51	8.45	0.024
Sumatera_Barat	2009	76.75	9.54	7.97	0.013
Riau	2009	297.17	9.48	8.56	0.031
Kepulauan_Riau	2009	63.89	8.27	8.11	0.010
Jambi	2009	44.13	8.77	5.54	0.009
Sumatera_Selatan	2009	137.33	16.28	7.61	0.019
Bangka_Belitung	2009	23.00	7.46	6.14	0.004
Bengkulu	2009	16.39	18.59	5.08	0.004
Lampung	2009	88.93	20.22	6.62	0.011
DKI_Jakarta	2009	757.70	3.62	12.15	0.195
Banten	2009	152.56	7.64	14.97	0.021
Jawa_Barat	2009	689.84	11.96	10.96	0.069
Jawa_Tengah	2009	397.90	17.72	7.33	0.046
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2009	41.41	17.23	6.00	0.007
Jawa_Timur	2009	686.85	16.68	5.08	0.067
Bali	2009	60.29	5.13	3.13	0.014

¹ Dalam Milyar Rupiah

² Dalam Persen (%)

³ Dalam Persen (%)

⁴ Rasio Penerimaan Daerah (APBD-(DAU+DAK))

Nusa_Tenggara_Timur	2009	24.20	23.31	3.97	0.003
Nusa_Tenggara_Barat	2009	44.10	22.75	6.25	0.006
Kalimantan_Barat	2009	54.28	9.30	5.44	0.008
Kalimantan_Tengah	2009	37.16	7.02	4.62	0.006
Kalimantan_Selatan	2009	51.46	5.12	6.36	0.016
Kalimantan_Timur	2009	285.59	7.73	10.83	0.054
Sulawesi_Utara	2009	33.03	9.79	10.56	0.004
Gorontalo	2009	7.07	25.01	5.89	0.001
Sulawesi_Tengah	2009	32.46	18.98	5.43	0.004
Sulawesi_Barat	2009	9.40	15.29	4.51	0.001
Sulawesi_Selatan	2009	99.95	12.31	8.90	0.015
Sulawesi_Tenggara	2009	25.66	18.93	4.74	0.004
Maluku	2009	7.07	28.23	10.57	0.004
Maluku_Utara	2009	4.69	10.36	6.76	0.001
Papua	2009	76.89	37.53	4.08	0.049
Papua_Barat	2009	18.14	35.71	7.56	0.022
Nangroe_Aceh_Darussalam	2010	79.15	21.00	8.37	0.054
Sumatera_Utara	2010	275.06	11.30	7.43	0.026
Sumatera_Barat	2010	87.23	9.50	6.95	0.011
Riau	2010	345.77	8.70	8.72	0.037
Kepulauan_Riau	2010	71.61	8.10	6.90	0.013
Jambi	2010	53.86	8.30	5.39	0.010
Sumatera_Selatan	2010	157.74	15.50	6.65	0.023
Bangka_Belitung	2010	35.56	6.50	5.57	0.004
Bengkulu	2010	28.85	18.30	4.59	0.004
Lampung	2010	150.56	18.90	5.63	0.012
DKI_Jakarta	2010	1075.18	3.50	11.05	0.197

Banten	2010	271.47	7.20	13.68	0.023
Jawa_Barat	2010	906.69	11.30	10.33	0.074
Jawa_Tengah	2010	623.22	16.60	6.21	0.046
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2010	64.68	16.80	5.69	0.007
Jawa_Timur	2010	990.65	15.30	4.25	0.075
Bali	2010	93.79	4.90	3.06	0.015
Nusa_Tenggara_Timur	2010	45.85	23.00	3.34	0.003
Nusa_Tenggara_Barat	2010	70.12	21.60	5.29	0.006
Kalimantan_Barat	2010	86.07	9.00	4.62	0.009
Kalimantan_Tengah	2010	56.53	6.80	4.14	0.007
Kalimantan_Selatan	2010	85.31	5.20	5.25	0.015
Kalimantan_Timur	2010	418.21	7.70	10.10	0.060
Sulawesi_Utara	2010	51.72	9.10	9.61	0.005
Gorontalo	2010	15.48	23.20	5.16	0.002
Sulawesi_Tengah	2010	51.75	18.10	4.61	0.004
Sulawesi_Barat	2010	17.18	13.60	3.25	0.002
Sulawesi_Selatan	2010	171.74	11.60	8.37	0.016
Sulawesi_Tenggara	2010	48.40	17.10	4.61	0.004
Maluku	2010	18.43	27.70	9.97	0.003
Maluku_Utara	2010	14.98	9.40	6.03	0.002
Papua	2010	110.81	36.80	3.55	0.038
Papua_Barat	2010	41.36	34.90	7.68	0.024
Nangroe_Aceh_Darussalam	2011	108.22	19.60	9.00	0.049
Sumatera_Utara	2011	377.04	11.30	8.18	0.028
Sumatera_Barat	2011	118.67	9.00	8.02	0.009
Riau	2011	485.65	8.50	6.09	0.036
Kepulauan_Riau	2011	126.91	7.40	5.38	0.010

Jambi	2011	103.52	8.70	4.63	0.011
Sumatera_Selatan	2011	226.67	14.20	6.60	0.023
Bangka_Belitung	2011	40.85	5.80	3.86	0.005
Bengkulu	2011	32.20	27.50	3.46	0.004
Lampung	2011	170.05	16.90	6.38	0.012
DKI_Jakarta	2011	1224.22	3.70	11.69	0.201
Banten	2011	306.17	6.30	13.74	0.023
Jawa_Barat	2011	1021.63	10.70	9.96	0.070
Jawa_Tengah	2011	692.56	15.80	7.07	0.044
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2011	71.37	16.10	4.39	0.007
Jawa_Timur	2011	1120.58	14.20	5.38	0.072
Bali	2011	104.61	4.20	2.95	0.015
Nusa_Tenggara_Timur	2011	48.82	21.20	3.11	0.004
Nusa_Tenggara_Barat	2011	68.18	19.70	5.25	0.007
Kalimantan_Barat	2011	96.73	8.60	4.60	0.009
Kalimantan_Tengah	2011	65.87	6.60	3.54	0.008
Kalimantan_Selatan	2011	98.78	5.30	6.29	0.019
Kalimantan_Timur	2011	515.19	6.80	11.43	0.069
Sulawesi_Utara	2011	57.35	8.50	10.10	0.005
Gorontalo	2011	17.41	18.80	6.74	0.001
Sulawesi_Tengah	2011	60.72	15.80	6.78	0.004
Sulawesi_Barat	2011	20.19	13.90	3.35	0.002
Sulawesi_Selatan	2011	198.29	10.30	8.13	0.016
Sulawesi_Tenggara	2011	55.76	14.60	4.69	0.004
Maluku	2011	21.37	23.00	10.81	0.003
Maluku_Utara	2011	17.08	9.20	5.34	0.002
Papua	2011	108.19	32.00	5.02	0.035

Papua_Barat	2011	44.25	31.90	6.73	0.021
Nangroe_Aceh_Darussalam	2012	114.55	18.58	9.06	0.044
Sumatera_Utara	2012	417.12	10.41	6.28	0.033
Sumatera_Barat	2012	131.44	8.00	6.65	0.011
Riau	2012	558.49	8.05	4.37	0.034
Kepulauan_Riau	2012	144.84	6.83	5.08	0.011
Jambi	2012	115.07	8.28	3.20	0.010
Sumatera_Selatan	2012	253.27	13.48	5.66	0.024
Bangka_Belitung	2012	45.40	5.37	3.43	0.004
Bengkulu	2012	36.21	17.51	3.62	0.004
Lampung	2012	187.35	15.65	5.20	0.015
DKI_Jakarta	2012	1369.43	3.70	9.94	0.189
Banten	2012	338.22	5.71	9.67	0.026
Jawa_Barat	2012	1128.25	9.89	9.08	0.084
Jawa_Tengah	2012	754.53	14.98	5.61	0.054
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2012	77.25	15.88	3.90	0.008
Jawa_Timur	2012	1248.77	13.08	4.11	0.075
Bali	2012	117.99	3.95	2.10	0.016
Nusa_Tenggara_Timur	2012	54.89	20.41	3.04	0.007
Nusa_Tenggara_Barat	2012	69.02	18.02	5.23	0.007
Kalimantan_Barat	2012	106.96	7.96	3.54	0.010
Kalimantan_Tengah	2012	73.43	6.19	3.14	0.008
Kalimantan_Selatan	2012	106.73	5.01	5.19	0.020
Kalimantan_Timur	2012	550.74	6.38	9.02	0.063
Sulawesi_Utara	2012	63.88	7.64	7.98	0.005
Gorontalo	2012	19.67	17.22	4.47	0.002
Sulawesi_Tengah	2012	69.64	14.94	3.95	0.005

Sulawesi_Barat	2012	22.63	13.01	2.16	0.002
Sulawesi_Selatan	2012	228.29	9.82	6.01	0.018
Sulawesi_Tenggara	2012	64.69	13.06	4.14	0.005
Maluku	2012	24.66	20.76	7.71	0.003
Maluku_Utara	2012	19.34	8.06	4.82	0.002
Papua	2012	112.81	30.66	3.71	0.031
Papua_Barat	2012	47.42	27.04	5.42	0.016
Nangroe_Aceh_Darussalam	2013	103.05	17.72	10.12	0.046
Sumatera_Utara	2013	403.93	10.39	6.45	0.030
Sumatera_Barat	2013	127.10	7.56	7.02	0.010
Riau	2013	522.24	8.42	5.48	0.030
Kepulauan_Riau	2013	100.31	6.35	5.63	0.010
Jambi	2013	85.56	8.42	4.76	0.010
Sumatera_Selatan	2013	231.68	14.06	4.84	0.022
Bangka_Belitung	2013	38.93	5.25	3.65	0.004
Bengkulu	2013	27.39	17.75	4.61	0.004
Lampung	2013	164.39	14.39	5.69	0.014
DKI_Jakarta	2013	1255.93	3.72	8.63	0.191
Banten	2013	244.55	5.89	9.54	0.027
Jawa_Barat	2013	1070.18	9.61	9.16	0.086
Jawa_Tengah	2013	623.75	14.44	6.01	0.056
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2013	63.69	15.03	3.24	0.008
Jawa_Timur	2013	1136.33	12.73	4.30	0.077
Bali	2013	94.56	4.49	1.83	0.016
Nusa_Tenggara_Timur	2013	40.47	20.24	3.25	0.006
Nusa_Tenggara_Barat	2013	56.28	17.25	5.30	0.007
Kalimantan_Barat	2013	84.96	8.74	3.99	0.010

Kalimantan_Tengah	2013	63.52	6.23	3.00	0.008
Kalimantan_Selatan	2013	83.36	4.76	3.66	0.018
Kalimantan_Timur	2013	425.43	6.38	7.95	0.056
Sulawesi_Utara	2013	53.40	8.50	6.79	0.005
Gorontalo	2013	11.75	18.01	4.15	0.002
Sulawesi_Tengah	2013	58.64	14.32	4.19	0.005
Sulawesi_Barat	2013	16.18	12.23	2.35	0.002
Sulawesi_Selatan	2013	184.78	10.32	5.10	0.018
Sulawesi_Tenggara	2013	40.73	13.73	4.38	0.005
Maluku	2013	13.25	19.27	9.91	0.003
Maluku_Utara	2013	7.73	7.64	3.80	0.002
Papua	2013	93.14	31.53	3.15	0.031
Papua_Barat	2013	50.91	27.14	4.40	0.022
Nangroe_Aceh_Darussalam	2014	130.45	16.98	9.02	0.044
Sumatera_Utara	2014	523.77	9.85	6.23	0.027
Sumatera_Barat	2014	167.04	6.89	6.50	0.011
Riau	2014	679.69	7.99	6.56	0.031
Kepulauan_Riau	2014	182.92	6.40	6.69	0.009
Jambi	2014	153.86	8.39	5.08	0.009
Sumatera_Selatan	2014	308.41	13.62	4.96	0.022
Bangka_Belitung	2014	56.39	4.97	5.14	0.004
Bengkulu	2014	45.24	17.09	3.47	0.004
Lampung	2014	231.01	14.21	4.79	0.014
DKI_Jakarta	2014	1761.41	4.09	8.47	-0.181
Banten	2014	432.76	5.51	9.07	0.027
Jawa_Barat	2014	1385.96	9.16	8.45	0.088
Jawa_Tengah	2014	925.66	13.58	5.68	0.057

Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2014	93.45	14.55	3.33	0.009
Jawa_Timur	2014	1540.70	12.28	4.19	0.081
Bali	2014	156.45	4.76	1.90	0.016
Nusa_Tenggara_Timur	2014	68.60	19.60	3.26	0.007
Nusa_Tenggara_Barat	2014	82.25	17.05	5.75	0.008
Kalimantan_Barat	2014	131.93	8.07	4.04	0.010
Kalimantan_Tengah	2014	89.87	6.07	3.24	0.008
Kalimantan_Selatan	2014	131.59	4.81	3.80	0.017
Kalimantan_Timur	2014	519.93	6.31	7.38	0.048
Sulawesi_Utara	2014	80.62	8.26	7.54	0.006
Gorontalo	2014	25.20	17.41	4.18	0.002
Sulawesi_Tengah	2014	90.26	13.61	3.68	0.006
Sulawesi_Barat	2014	29.39	12.05	2.08	0.002
Sulawesi_Selatan	2014	300.12	9.54	5.08	0.018
Sulawesi_Tenggara	2014	78.62	12.77	4.43	0.005
Maluku	2014	31.73	18.44	10.51	0.003
Maluku_Utara	2014	24.05	7.41	5.29	0.002
Papua	2014	123.18	27.80	3.44	0.037
Papua_Barat	2014	58.29	26.26	5.02	0.020

*Sumber Data:

Badan Pusat Statistik

Kementrian Keuangan Republik Indonesia

3.

Data Penelitian Regresi Data Panel Kinerja Pembangunan Daerah*

Provinsi	Periode	IPM ⁵	DF	PAD ⁶	DBH ⁷	GI ⁸
Nangroe_Aceh_Darussalam	2009	71.31	0.055	795.87	1012.73	0.29
Sumatera_Utara	2009	73.80	0.024	2106.07	360.21	0.32
Sumatera_Barat	2009	73.44	0.013	739.75	93.72	0.30
Riau	2009	75.60	0.031	1352.41	1879.15	0.33
Kepulauan_Riau	2009	74.54	0.010	398.95	643.39	0.29
Jambi	2009	72.45	0.009	526.44	293.43	0.27
Sumatera_Selatan	2009	72.61	0.019	1054.33	825.81	0.31
Bangka_Belitung	2009	72.55	0.004	246.80	104.32	0.29
Bengkulu	2009	72.55	0.004	287.78	48.88	0.30
Lampung	2009	70.93	0.011	860.36	160.50	0.35
DKI_Jakarta	2009	77.36	0.195	10601.06	8650.84	0.36
Banten	2009	70.06	0.021	1687.72	351.55	0.37
Jawa_Barat	2009	71.64	0.069	5520.99	1188.43	0.36
Jawa_Tengah	2009	72.10	0.046	4000.74	557.67	0.32
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2009	75.23	0.007	590.85	61.05	0.38
Jawa_Timur	2009	71.06	0.067	5708.03	957.08	0.33
Bali	2009	71.52	0.014	1163.95	128.71	0.31
Nusa_Tenggara_Timur	2009	66.60	0.003	255.65	55.08	0.36
Nusa_Tenggara_Barat	2009	64.66	0.006	474.45	98.72	0.35
Kalimantan_Barat	2009	68.79	0.008	579.58	112.56	0.32
Kalimantan_Tengah	2009	74.36	0.006	382.02	158.94	0.29
Kalimantan_Selatan	2009	69.30	0.016	1024.63	477.58	0.35

⁵ Dalam Persen (%)

⁶ Dalam Milyar Rupiah

⁷ Dalam Milyar Rupiah

⁸ Rasio Indeks Gini (%)

Kalimantan_Timur	2009	75.11	0.054	2218.78	3100.09	0.38
Sulawesi_Utara	2009	75.68	0.004	331.08	62.75	0.31
Gorontalo	2009	69.79	0.001	109.41	15.72	0.35
Sulawesi_Tengah	2009	70.70	0.004	275.19	66.99	0.34
Sulawesi_Barat	2009	69.18	0.001	64.44	25.26	0.30
Sulawesi_Selatan	2009	70.94	0.015	1242.77	206.23	0.39
Sulawesi_Tenggara	2009	69.52	0.004	223.13	58.90	0.36
Maluku	2009	70.96	0.004	146.19	57.78	0.31
Maluku_Utara	2009	68.63	0.001	73.29	70.31	0.33
Papua	2009	64.53	0.049	369.73	423.55	0.38
Papua_Barat	2009	68.58	0.022	73.62	364.03	0.35
Nangroe_Aceh_Darussalam	2010	67.09	0.054	796.95	320.17	0.30
Sumatera_Utara	2010	67.09	0.026	2554.78	405.84	0.35
Sumatera_Barat	2010	67.25	0.011	1006.82	108.76	0.33
Riau	2010	68.65	0.037	1339.27	2905.30	0.33
Kepulauan_Riau	2010	65.39	0.013	522.01	996.07	0.29
Jambi	2010	64.44	0.010	686.63	423.43	0.30
Sumatera_Selatan	2010	65.35	0.023	1371.08	1293.17	0.34
Bangka_Belitung	2010	63.71	0.004	328.12	100.57	0.30
Bengkulu	2010	66.02	0.004	351.09	54.77	0.37
Lampung	2010	71.13	0.012	1118.34	237.47	0.36
DKI_Jakarta	2010	76.31	0.197	12891.99	9535.61	0.36
Banten	2010	66.08	0.023	2321.59	417.01	0.42
Jawa_Barat	2010	66.15	0.074	7252.24	1303.16	0.36
Jawa_Tengah	2010	75.37	0.046	4785.13	614.57	0.34
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2010	65.36	0.007	740.20	87.82	0.41
Jawa_Timur	2010	67.54	0.075	7478.53	1175.39	0.34
Bali	2010	70.10	0.015	1393.73	150.96	0.37

Nusa_Tenggara_Timur	2010	59.21	0.003	298.15	68.31	0.38
Nusa_Tenggara_Barat	2010	61.16	0.006	515.34	158.43	0.40
Kalimantan_Barat	2010	61.97	0.009	777.24	135.89	0.37
Kalimantan_Tengah	2010	65.96	0.007	504.22	181.05	0.30
Kalimantan_Selatan	2010	65.20	0.015	1286.26	452.21	0.37
Kalimantan_Timur	2010	71.31	0.060	2714.82	4274.66	0.37
Sulawesi_Utara	2010	67.83	0.005	418.74	74.31	0.37
Gorontalo	2010	63.29	0.002	133.15	26.93	0.43
Sulawesi_Tengah	2010	66.00	0.004	411.80	71.24	0.37
Sulawesi_Barat	2010	62.65	0.002	90.21	33.06	0.36
Sulawesi_Selatan	2010	65.99	0.016	1545.59	224.39	0.40
Sulawesi_Tenggara	2010	59.74	0.004	339.36	71.84	0.42
Maluku	2010	64.27	0.003	169.57	75.11	0.33
Maluku_Utara	2010	62.79	0.002	77.84	99.10	0.34
Papua	2010	59.60	0.038	380.03	538.98	0.41
Papua_Barat	2010	54.45	0.024	125.77	834.80	0.38
Nangroe_Aceh_Darussalam	2011	67.45	0.049	802.84	1494.79	0.33
Sumatera_Utara	2011	67.34	0.028	3578.46	386.54	0.35
Sumatera_Barat	2011	67.81	0.009	1147.30	92.23	0.35
Riau	2011	68.90	0.036	2210.13	2729.96	0.36
Kepulauan_Riau	2011	66.14	0.010	620.90	829.26	0.32
Jambi	2011	65.12	0.011	984.23	466.59	0.34
Sumatera_Selatan	2011	65.96	0.023	1849.12	1313.46	0.34
Bangka_Belitung	2011	64.20	0.005	459.21	201.04	0.30
Bengkulu	2011	66.59	0.004	440.93	68.26	0.36
Lampung	2011	71.61	0.012	1395.68	251.10	0.37
DKI_Jakarta	2011	76.98	0.201	17825.99	6939.80	0.44
Banten	2011	66.64	0.023	2895.57	343.93	0.40

Jawa_Barat	2011	66.67	0.070	8502.64	1298.76	0.41
Jawa_Tengah	2011	75.93	0.044	5564.23	622.22	0.38
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2011	66.06	0.007	867.11	82.04	0.40
Jawa_Timur	2011	68.22	0.072	8898.62	1125.55	0.37
Bali	2011	70.87	0.015	1723.62	128.70	0.41
Nusa_Tenggara_Timur	2011	60.24	0.004	391.83	87.83	0.36
Nusa_Tenggara_Barat	2011	62.14	0.007	741.29	162.67	0.36
Kalimantan_Barat	2011	62.35	0.009	1080.46	154.01	0.40
Kalimantan_Tengah	2011	66.38	0.008	815.24	235.36	0.34
Kalimantan_Selatan	2011	65.89	0.019	1868.60	653.44	0.37
Kalimantan_Timur	2011	72.02	0.069	4501.21	5206.24	0.38
Sulawesi_Utara	2011	68.31	0.005	535.09	80.36	0.39
Gorontalo	2011	64.27	0.001	158.08	26.19	0.46
Sulawesi_Tengah	2011	66.65	0.004	519.97	82.76	0.38
Sulawesi_Barat	2011	63.48	0.002	114.31	35.30	0.34
Sulawesi_Selatan	2011	66.52	0.016	1959.52	258.39	0.41
Sulawesi_Tenggara	2011	60.63	0.004	346.17	82.74	0.41
Maluku	2011	64.75	0.003	221.88	79.62	0.41
Maluku_Utara	2011	63.19	0.002	84.81	99.38	0.33
Papua	2011	59.90	0.035	363.10	545.08	0.42
Papua_Barat	2011	55.01	0.021	152.16	742.88	0.40
Nangroe_Aceh_Darussalam	2012	67.81	0.044	901.72	373.31	0.32
Sumatera_Utara	2012	67.74	0.033	4052.10	460.16	0.33
Sumatera_Barat	2012	68.36	0.011	1225.47	192.83	0.36
Riau	2012	69.15	0.034	2588.69	3067.17	0.40
Kepulauan_Riau	2012	66.94	0.011	723.05	1110.42	0.35
Jambi	2012	65.79	0.010	995.82	567.52	0.34
Sumatera_Selatan	2012	66.61	0.024	2001.74	1617.24	0.40

Bangka_Belitung	2012	64.87	0.004	438.37	162.28	0.29
Bengkulu	2012	67.21	0.004	483.77	79.06	0.35
Lampung	2012	72.36	0.015	1678.70	310.62	0.36
DKI_Jakarta	2012	77.53	0.189	22040.80	11279.64	0.42
Banten	2012	67.21	0.026	3395.88	454.58	0.39
Jawa_Barat	2012	67.32	0.084	9982.92	1514.43	0.41
Jawa_Tengah	2012	76.15	0.054	6629.31	751.28	0.38
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2012	66.74	0.008	1004.06	118.43	0.43
Jawa_Timur	2012	68.92	0.075	9725.63	1523.96	0.36
Bali	2012	71.62	0.016	2042.09	180.27	0.43
Nusa_Tenggara_Timur	2012	60.81	0.007	459.66	100.88	0.36
Nusa_Tenggara_Barat	2012	62.98	0.007	745.98	191.53	0.35
Kalimantan_Barat	2012	63.41	0.010	1164.43	182.69	0.38
Kalimantan_Tengah	2012	66.66	0.008	945.36	294.57	0.33
Kalimantan_Selatan	2012	66.68	0.020	2517.52	843.08	0.38
Kalimantan_Timur	2012	72.62	0.063	5409.95	5984.33	0.36
Sulawesi_Utara	2012	69.04	0.005	633.65	99.29	0.43
Gorontalo	2012	65.00	0.002	180.04	30.86	0.44
Sulawesi_Tengah	2012	67.26	0.005	605.82	97.60	0.40
Sulawesi_Barat	2012	64.16	0.002	140.40	43.68	0.31
Sulawesi_Selatan	2012	67.07	0.018	2198.776	309.48	0.41
Sulawesi_Tenggara	2012	61.01	0.005	439.18	115.21	0.40
Maluku	2012	65.43	0.003	267.50	91.69	0.38
Maluku_Utara	2012	63.93	0.002	115.91	117.28	0.34
Papua	2012	60.30	0.031	623.16	442.48	0.44
Papua_Barat	2012	55.55	0.016	175.45	576.13	0.43
Nangroe_Aceh_Darussalam	2013	68.30	0.046	1325.44	1507.85	0.34
Sumatera_Utara	2013	68.36	0.030	4091.29	432.33	0.35

Sumatera_Barat	2013	68.91	0.010	1366.18	137.02	0.36
Riau	2013	69.91	0.030	2725.62	2844.81	0.37
Kepulauan_Riau	2013	67.76	0.010	907.98	1060.97	0.36
Jambi	2013	66.16	0.010	1063.92	599.95	0.35
Sumatera_Selatan	2013	67.50	0.022	2021.70	1753.51	0.38
Bangka_Belitung	2013	65.73	0.004	495.80	146.53	0.31
Bengkulu	2013	67.92	0.004	525.21	71.11	0.39
Lampung	2013	73.02	0.014	1771.30	263.27	0.36
DKI_Jakarta	2013	78.08	0.191	26852.19	9088.36	0.43
Banten	2013	68.02	0.027	4118.55	498.32	0.40
Jawa_Barat	2013	68.25	0.086	12360.11	1398.01	0.41
Jawa_Tengah	2013	76.44	0.056	8212.80	714.43	0.39
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2013	67.55	0.008	1216.10	94.73	0.44
Jawa_Timur	2013	69.47	0.077	11596.38	1374.73	0.36
Bali	2013	72.09	0.016	2529.98	144.51	0.40
Nusa_Tenggara_Timur	2013	61.68	0.006	528.8321	84.03	0.35
Nusa_Tenggara_Barat	2013	63.76	0.007	858.45	158.24	0.36
Kalimantan_Barat	2013	64.30	0.010	1347.40	163.16	0.40
Kalimantan_Tengah	2013	67.41	0.008	1093.82	316.66	0.35
Kalimantan_Selatan	2013	67.17	0.018	2502.28	780.06	0.36
Kalimantan_Timur	2013	73.21	0.056	885.26	5272.17	0.37
Sulawesi_Utara	2013	69.49	0.005	789.63	89.91	0.42
Gorontalo	2013	65.79	0.002	214.68	26.80	0.44
Sulawesi_Tengah	2013	67.92	0.005	662.23	100.19	0.41
Sulawesi_Barat	2013	64.70	0.002	154.13	39.59	0.35
Sulawesi_Selatan	2013	67.55	0.018	2560.05	268.13	0.43
Sulawesi_Tenggara	2013	61.53	0.005	514.86	126.59	0.43
Maluku	2013	66.09	0.003	304.36	75.75	0.37

Maluku_Utara	2013	64.78	0.002	165.89	98.39	0.32
Papua	2013	60.91	0.031	597.71	487.86	0.44
Papua_Barat	2013	56.25	0.022	236.28	1862.95	0.43
Nangroe_Aceh_Darussalam	2014	68.81	0.044	1731.13	1277.12	0.32
Sumatera_Utara	2014	68.87	0.027	4416.81	403.80	0.32
Sumatera_Barat	2014	69.36	0.011	1729.22	148.06	0.33
Riau	2014	70.33	0.031	3245.09	3367.09	0.35
Kepulauan_Riau	2014	68.24	0.009	1070.21	925.27	0.40
Jambi	2014	66.75	0.009	1281.24	516.83	0.33
Sumatera_Selatan	2014	68.06	0.022	2407.91	1934.57	0.40
Bangka_Belitung	2014	66.42	0.004	562.93	174.95	0.30
Bengkulu	2014	68.27	0.004	672.06	95.56	0.36
Lampung	2014	73.40	0.014	2274.69	287.58	0.35
DKI_Jakarta	2014	78.39	-0.181	31274.22	9591.55	0.43
Banten	2014	68.78	0.027	4899.13	418.84	0.40
Jawa_Barat	2014	68.80	0.088	15038.15	1496.60	0.41
Jawa_Tengah	2014	76.81	0.057	9916.36	659.53	0.38
Daerah_Istimewa_Yogyakarta	2014	68.14	0.009	1464.60	76.76	0.42
Jawa_Timur	2014	69.89	0.081	14442.22	1516.91	0.37
Bali	2014	72.48	0.016	2920.42	144.53	0.42
Nusa_Tenggara_Timur	2014	62.26	0.007	763.34	76.82	0.36
Nusa_Tenggara_Barat	2014	64.31	0.008	1115.06	177.03	0.38
Kalimantan_Barat	2014	64.89	0.010	1621.61	178.46	0.39
Kalimantan_Tengah	2014	67.77	0.008	1253.71	343.06	0.35
Kalimantan_Selatan	2014	67.63	0.017	2898.70	767.80	0.36
Kalimantan_Timur	2014	73.82	0.048	6663.11	4194.97	0.35
Sulawesi_Utara	2014	69.96	0.006	937.68	84.42	0.42
Gorontalo	2014	66.43	0.002	281.92	23.66	0.41

Sulawesi_Tengah	2014	68.49	0.006	824.61	87.95	0.37
Sulawesi_Barat	2014	65.17	0.002	223.70	29.94	0.35
Sulawesi_Selatan	2014	68.07	0.018	3029.12	248.81	0.42
Sulawesi_Tenggara	2014	62.24	0.005	599.94	123.63	0.41
Maluku	2014	66.74	0.003	425.43	75.63	0.35
Maluku_Utara	2014	65.18	0.002	203.06	108.43	0.32
Papua	2014	61.28	0.037	944.93	532.11	0.41
Papua_Barat	2014	56.75	0.020	306.67	1600.16	0.44

*Sumber Data:

Badan Pusat Statistik

Kementrian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN IV

UJI SPESIFIKASI MODEL

1. Pertumbuhan Ekonomi

1. Uji Likelihood

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ102

Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.017705	(5,189)	0.0121
Cross-section Chi-square	15.207755	5	0.0095

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 01/27/17 Time: 03:37

Sample: 1 198

Periods included: 33

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	153.5003	63.47286	2.418361	0.0165
DF	4809.640	542.6853	8.862669	0.0000
POV	-8.483552	2.604050	-3.257830	0.0013
UE	12.94700	8.072820	1.603777	0.1104
R-squared	0.395965	Mean dependent var		232.2488
Adjusted R-squared	0.386624	S.D. dependent var		336.0652
S.E. of regression	263.2006	Akaike info criterion		14.00371
Sum squared resid	13439264	Schwarz criterion		14.07013
Log likelihood	-1382.367	Hannan-Quinn criter.		14.03059
F-statistic	42.39112	Durbin-Watson stat		1.605080
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ102

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.056843	3	0.0028

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DF	4831.435...	4809.640469	5243.926572	0.7634
POV	-6.591011	-8.483552	0.318790	0.0008
UE	20.440167	12.946999	7.764760	0.0072

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 01/27/17 Time: 03:39

Sample: 1 198

Periods included: 33

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.39765	66.09872	1.246585	0.2141
DF	4831.436	534.0348	9.047042	0.0000
POV	-6.591011	2.600897	-2.534130	0.0121
UE	20.44017	8.349471	2.448079	0.0153

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.440622	Mean dependent var	232.2488
Adjusted R-squared	0.416945	S.D. dependent var	336.0652
S.E. of regression	256.6129	Akaike info criterion	13.97740
Sum squared resid	12445682	Schwarz criterion	14.12687
Log likelihood	-1374.763	Hannan-Quinn criter.	14.03790
F-statistic	18.60941	Durbin-Watson stat	1.719482
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Indeks Pembangunan Manusia

1. Uji Likelihood

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ100

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.718618	(5,188)	0.0000
Cross-section Chi-square	45.520158	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 01/27/17 Time: 03:41

Sample: 1 198

Periods included: 33

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	79.22125	2.425714	32.65895	0.0000
DF	7.832956	8.774738	0.892671	0.3731
GI	-36.04992	6.640052	-5.429163	0.0000
DBH	0.000351	0.000238	1.473306	0.1423
PAD	0.000447	9.41E-05	4.753812	0.0000
R-squared	0.354887	Mean dependent var		67.56460
Adjusted R-squared	0.341517	S.D. dependent var		4.490628
S.E. of regression	3.644009	Akaike info criterion		5.448974
Sum squared resid	2562.809	Schwarz criterion		5.532011
Log likelihood	-534.4485	Hannan-Quinn criter.		5.482585
F-statistic	26.54308	Durbin-Watson stat		1.599656
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ100

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.839857	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DF	7.327372	7.831921	2.151892	0.7309
GI	-22.608307	-35.610311	7.089831	0.0000
DBH	0.000363	0.000351	0.000000	0.3958
PAD	0.000437	0.000447	0.000000	0.5746

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 01/27/17 Time: 03:42

Sample: 1 198

Periods included: 33

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.31329	2.404753	30.90266	0.0000
DF	7.327372	8.064827	0.908559	0.3647
GI	-22.60831	6.579665	-3.436088	0.0007
DBH	0.000363	0.000215	1.685179	0.0936
PAD	0.000437	8.68E-05	5.033856	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.487385	Mean dependent var	67.56460
Adjusted R-squared	0.462844	S.D. dependent var	4.490628
S.E. of regression	3.291221	Akaike info criterion	5.269580
Sum squared resid	2036.442	Schwarz criterion	5.435654
Log likelihood	-511.6884	Hannan-Quinn criter.	5.336801
F-statistic	19.86074	Durbin-Watson stat	1.880427
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN V

HASIL OUTPUT

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/27/17 Time: 03:45
 Sample: 1 198
 Periods included: 33
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.39765	66.09872	1.246585	0.2141
DF	4831.436	534.0348	9.047042	0.0000
POV	-6.591011	2.600897	-2.534130	0.0121
UE	20.44017	8.349471	2.448079	0.0153

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.440622	Mean dependent var	232.2488
Adjusted R-squared	0.416945	S.D. dependent var	336.0652
S.E. of regression	256.6129	Akaike info criterion	13.97740
Sum squared resid	12445682	Schwarz criterion	14.12687
Log likelihood	-1374.763	Hannan-Quinn criter.	14.03790
F-statistic	18.60941	Durbin-Watson stat	1.719482
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Indeks Pembangunan Manusia

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 01/27/17 Time: 03:46

Sample: 1 198

Periods included: 33

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.31329	2.404753	30.90266	0.0000
DF	7.327372	8.064827	0.908559	0.3647
GI	-22.60831	6.579665	-3.436088	0.0007
DBH	0.000363	0.000215	1.685179	0.0936
PAD	0.000437	8.68E-05	5.033856	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.487385	Mean dependent var	67.56460
Adjusted R-squared	0.462844	S.D. dependent var	4.490628
S.E. of regression	3.291221	Akaike info criterion	5.269580
Sum squared resid	2036.442	Schwarz criterion	5.435654
Log likelihood	-511.6884	Hannan-Quinn criter.	5.336801
F-statistic	19.86074	Durbin-Watson stat	1.880427
Prob(F-statistic)	0.000000		

CURRICULUM VITAE



A. BIOGRAFI

Nama : Virta Putri Isnaeni
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 12 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat rumah : Jl. KH.Killin RT 004/004, Batu Jaya, Batu Ceper, Tangerang
Alamat kost : Jl. Seturan 1 No. 222, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY
Email : vpi.virta@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2001-2006 : SD Negeri 5 Wonosobo
2006-2007 : SD Negeri 1 Danaraja
2007-2010 : MTs Manba'ul Ulum, Pesantren Asshiddiqiyah II Tangerang
2010-2013 : SMA Manba'ul Ulom, Pesantren Asshiddiqiyah II Tangerang
2013-sekarang : Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta